



R A N C A N G A N

RENJA AKHIR 2015

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT karena penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau telah dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 3).

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah dan tujuan awal dari proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pelayanan publik SKPD tahun 2015.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2015. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini, kami membuka pintu untuk menerima saran dan masukan menuju arah yang lebih baik.

Terima kasih.

Pekanbaru, Mei 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU



MUHAMAD GUNTUR
Pembina Tingkat I
NIP. 19730806 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
DAFTAR TABEL.....	iv	
DAFTAR GAMBAR.....	vi	
BAB I : PENDAHULUAN.....	1	
A. Latar Belakang	1	
B. Landasan Hukum.....	4	
C. Maksud dan Tujuan	8	
D. Sistematika Penulisan	9	
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD	I-1	11
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	II-1	
1. Capaian Pelaksanaan Rencana Kerja	II-1	
2. Target Capaian Pelaksanaan Rencana Kerja 2014	II-8	
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II-12	
1. Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi	II-12	
2. Sumber Daya.....	II-15	
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	II-20	
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	II-21	
2. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	II-22	
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-29	
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN.....	III-1	
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1	
B. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah	III-6	
C. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 2015	III-8	

BAB	IV.	PROGRAM DAN KEGIATAN.....	IV-1
BAB	V.	PENUTUP.....	v-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Capaian Kinerja sasaran.....	II-2
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Sasaran Strategis BKD Provinsi Riau Tahun 2013.....	II-4
Tabel 2.3.	Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014.....	II-10
Tabel 2.4.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Menurut Jabatan Tahun 2013.....	II-5
Tabel 2.5.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Menurut Golongan Ruang Gaji Tahun 2013.....	II-16
Tabel 2.6.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Menurut Pendidikan Formal Tahun 2013.....	II-17
Tabel 2.7.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Menurut Menurut Pendidikan Penjurusan Tahun 2013.....	II-18
Tabel 2.8.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013.....	II-19
Tabel 2.9.	Kekuatan dan Kelemahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau.....	II-22
Tabel 2.10.	Analisis Isu-Isu Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau.....	II-23
Tabel 2.11.	Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis.....	II-26

Tabel 2.12. Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau	II-26
Tabel 2.13. Perbandingan Program Berdasarkan Usulan SKPD dengan RKPD	II-29
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau	65
Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2015	IV-3

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/Eselon Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau II-16
- Gambar 2.2. Keadaan Golongan Ruang Gaji Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau II-17
- Gambar 2.3. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau II-18
- Gambar 2.4. Tingkat Pendidikan Penjenjangan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau II-19
- Gambar 2.5. Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau II-20

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Secara hierarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2015. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau disusun dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 yaitu " ***Mewujudkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Sebagai Pusat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang Profesional dan Sejahtera Menuju Visi Riau 2025*** ".

Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi tersebut, adalah :

Pusat Pembinaan Aparatur, adalah pusat pembinaan aparatur pemerintah yang mampu mengkoordinasikan, memadukan dan menyelaraskan kegiatan pembinaan aparatur Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten / Kota se - Provinsi Riau.

Pusat Pengembangan Aparatur, bermakna sebagai pusat pengembangan aparatur pemerintah yang mampu menyusun rencana dan program kerja demi pengembangan aparatur pemerintah.

Aparatur yang Profesional, adalah sumber daya manusia yang memenuhi syarat - syarat yaitu kompetensi dibidang pekerjaannya, loyal, mempunyai integritas, mampu bekerja keras, dan mempunyai motivasi.

Sejahtera, adalah kondisi dimana aparatur pemerintah mampu memenuhi kebutuhan hidup layak sesuai dengan standar lokal, memiliki jaminan sosial untuk mengatasi kerentanan saat ini maupun dimasa mendatang.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau tahun 2015 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses

pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2015.

B. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran Negara Nomor 112;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah

Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000 – 2020;

18. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Riau tahun 2014-2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud kegiatan penyusunan renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2015.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan renja SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah;

- Mengevaluasi terhadap program - program dan kegiatan - kegiatan tahun sebelumnya sehingga dapat ditentukan apakah program dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan untuk tahun berikutnya ;
- Mengumpulkan rancangan / usulan program - program dan kegiatan - kegiatan dari unit - unit dalam lingkup kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau ;
- Memilih, memilah dan menelaah rancangan / usulan program - program dan kegiatan - kegiatan dan disusun berdasarkan skala prioritas ;
- Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015 bagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau.
- Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 ini mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- C. Review terhadap Rancangan Awal RKP

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

1. Capaian Pelaksanaan Rencana Kerja

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2018. Rencana kerja tersebut dikelompokkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan dalam renstra. Sehingga renja yang diajukan tiap tahunnya mempunyai hubungan yang erat terhadap upaya pencapaian visi yang dicita - citakan tersebut. Dalam renja tersebut juga memuat program - program dan kegiatan - kegiatan yang telah disusun dan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah BKP2D Provinsi Riau selama tahun 2013 (N-2) dan perkiraan target tahun 2014 (N-1).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) BKP2D Provinsi Riau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014.

Analisis Pencapaian Akuntabilitas Kinerja BKP2D Provinsi Riau tahun 2013 dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dari misi - misi yang telah ditetapkan sebelumnya, berikut ini disajikan Capaian Kinerja Sasaran (*Performance Results*) selama tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	1. Jumlah Aparatur yang dibiayai mengikuti pendidikan bergelar	19 orang	15 orang
	2. Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek), Workshop dan Sosialisasi	60 org alumni SCP, 274 org Bimtek, 70 org sosialisasi	60 org alumni SCP, 214 org Bimtek, 40 org Sosialisasi
	3. Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	66 orang	66 orang
	4. Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional	9 orang	5 orang
	5. Jumlah Aparatur mengikuti Diklat Teknis	221 orang	221 orang
	6. Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan	578 orang	-
	7. Jumlah Pejabat Esselon yang telah di Assesment	80 orang	80 orang
	8. Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuain Ijazah	150 orang	280 Orang
2. Bertambahnya PNS Provinsi Riau	1. Jumlah Formasi PNS Provinsi Riau	400 orang	400 orang
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan BKD Provinsi Riau	1. Jumlah Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	3 sop	3 sop
	2. Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan dengan baik	611 orang, 3500 sk	611 orang, 3500 sk
4. Meningkatkan	1. Jumlah PNS yang	500, orang,	500, orang,

Kualitas Data dan Database Provinsi Riau	memilik data dasar lengkap	1500 file	1500 file
	2. Jumlah Aplikasi Administrasi Kepegawaian yang sudah dimanfaatkan secara online	1000 file, 60 berita, 1000 kpe	1000 file, 60 berita, 1000 kpe
5. Meningkatnya Fungsi Pengawasan Terhadap Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	1. Jumlah PNS dalam Proses Penegakan Disiplin dan yang mendapat Teguran/Sanksi	50 orang	50 orang
	2. Jumlah PNS yang mendapat penghargaan	400 org penerima satya lencana, 30 orang PNS yg berprestasi	400 org penerima satya lencana, 30 orang PNS yg berprestasi
	3. Jumlah PNS yang sudah mengikuti sumpah/janji PNS	300 orang	300 orang
6. Meningkatnya Kapasitas Badan Kepegawaian Daerah Provisni Riau	1. Jumlah Penambahan Gedung dan Fasilitas Gedung	Keluarnya amdal,izin lingkungan,pe mbuatan pagar 344,65 m2	Selesainya amdal,izin lingkungan,pe mbuatan pagar 344,65 m2
	2. Jumlah Penambahan Peralatan	25 buah, 10 unit, 1 set	25 buah

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Sasaran Strategis
BKD Provinsi Riau Tahun 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	49.847.000	100,00
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	785.550.000	568.150.927	100,00
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	150.000.000	127.700.323	95,00
		4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	556.696.000	526.124.250	100,00
		5. Penyediaan alat Tulis Kantor	154.249.940	154.209.000	100,00
		6. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	169.493.125	168.349.000	100,00
		7. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	125.428.500	125.248.450	100,00
		8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	311.250.000	309.674.000	100,00
		9. Penyediaan makanan dan Minuman	78.000.000	75.800.000	100,00
		10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	993.526.790	945.389.997	100,00
		11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	75.000.000	74.973.000	100,00
		12. Pameran Riau Expo	75.000.000	74.554.000	100,00
		13. Pengelolaan Humas BKD	75.000.000	57.210.000	80,00
2.	Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur			
		1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	532,566,600	527,210.000	100,00
		2. Pengadaan mebeleur	602,007,500	553,524,500	100,00
		3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1,157.820.000	149.161.000	13,00
		4. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	75.000.000	72.900.000	100,00
		5. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	75.000.000	100,00
		6. Pembangunan Kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya	8.079.281.900	6.925.715.592	99,9
		7. Rehabilitasi Gedung Kantor BKD Provinsi Riau	2.690.000.000	2.011.890.900	77,78
		8. Pembangunan Gedung Sarana Penunjang 2 (dua) Lantai	429.069.475	402.812.975	100,00
3.	Meningkatnya disiplin PNS dalam	Program peningkatan disiplin Aparatur			
		1. Pengadaan Pakaian dinas	89.637.500	88.452.100	100,00

	kerapian berpakaian	Beserta dan Perengkapannya			
		2. Pengadaan Baju Kopri	89.63.500	88.452.100	100,00
		3. Pelaksanaan Sumpah/janji PNS	60.000.000	58.158.400	100,00
4		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas			
		1. Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	50.500.000	48.685.600	100,00
		2. Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS memasuki masa Pensiun	100.000.000	90.171.300	90,17
		3. Pengelolaan Pensiun PNS	150.000.000	95.752.100	100,00
5.	Meningkatnya mutu sumber daya manusia aparatur Pemerintah Provinsi Riau melalui pelatihan teknis tugas dan fungsi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
		1. Penyediaan jasa kesehatan jasmani/rohani pegawai	80,000,000	73,775,000	100.00
		2. Pendidikan, Pelatihan, kursus dan Bimtek PNS BKD	136,300,000	119,565,000	100.00
6.	Meningkatnya mutu sumber daya manusia aparatur pemerintah Provinsi Riau melalui pendidikan formal, diklat struktural dan diklat teknis fungsional dan administrasi pegawai	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
		1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	95,000,000	55,263,120	100.00
		2. Penyusunan laporan keuangan semesteran	25,000,000	24,997,550	100.00
		3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	25,000,000	24,402,600	100.00
		4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	25,000,000	25,000,000	100.00
		5. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	150,000,000	122,519,700	100.00
		6. Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	100,000,000	65,952,700	100.00
		7. Rapat koordinasi teknis	200,000,000	176,462,100	100.00
		8. Penyusunan Laporan Tahunan	24,354,950	16,414,950	100.00
7.	Meningkatnya mutu pelayanan kepada pegawai yang memasuki masa pensiun	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas			
		1. Diklat Luar Negeri (Kerjasama dengan Pemerintah Singapore) I	250,000,000	15,409,000	50.00
		2. Try Oute bagi Alumni SCP	150,000,000	14,500,000	50.00
		3. Diklat teknis komputer	99,945,000	96,416,900	100.00
		4. Diklat penatausahaan keuangan daerah	78,552,500	69,886,500	100.00
		5. Diklat penilaian aset/barang daerah	127,379,000	107,329,100	100.00
		6. Diklat bendahara keuangan daerah	177,454,000	124,535,300	100.00

	7. Diklat teknis Bahasa Inggris	103,110,400	103,026,400	100.00
	8. Diklat teknis kehumasan dan protokol	168,307,100	92,523,340	100.00
	9. Diklat teknis pelayanan kerumahtanggaan	177,307,100	91,183,000	100.00
	10. Pengadaan calon PNS	2,000,000,000	1,789,669,220	100.00
	11. Pengelolaan pengangkatan CPNS menjadi PNS	100,000,000	61,432,000	100.00
	12. Seleksi penerimaan IPDN	278,200,000	240,866,100	100.00
	13. Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah*	297,772,000	240,350,800	100.00
	14. Penanganan kasus-kasus kepegawaian	100,000,000	59,830,000	100.00
	15. Pelaksanaan kelanjutan pengembangan assesment SDM Provinsi Riau*	416,042,120	302,925,050	80.00
	16. Diklat teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	126,960,000	84,123,900	80.00
	17. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat	73,266,000	60,240,400	100.00
	18. Diklat fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	127,560,000	17,463,600	50.00
	19. Bimbingan teknis manajemen kontrak bagi aparatur Pemerintahan Provinsi Riau	500,000,000	433,364,500	100.00
	20. Diklat Management of Training (MoT)	157,868,625	140,883,200	100.00
	21. Diklat kompetensi dan pengembangan widyaiswara	129,300,000	82,952,628	80.00
	22. Monitoring IPDN	154,911,000	40,472,200	50.00
	23. Bimtek pelayanan prima	95,000,000	91,189,700	100.00
	24. Penyusunan SOP dan SPP Badan Kepegawaian dan Diklat	85,000,000	55,480,000	75.00
	25. Pemberian beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas	1,750,374,200	1,340,224,000	80.00
	26. Pelaksanaan pokja KPK Provinsi Riau*	121,920,000	80,231,600	100.00
	27. Bimbingan Teknis PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Pengganti DP3 PNS)	266,478,650	256,933,650	100.00
	28. Penyusunan formasi PNS Provinsi Riau	297,797,500	292,356,000	100.00
	29. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010	100,000,000	98,458,600	100.00
	30. Sosialisasi Peraturan Tatacara Perhitungan Angka Kredit Bagi Widyaiswara	112,200,000	96,501,140	100.00
	31. Penataan PNS Pemerintah Provinsi Riau*	288,020,050	193,404,100	70.00
	32. Pembentukan Karakter TIM Work Sumber Daya Aparatur	791,923,950	504,325,450	70.00

		Eselon I dan Eselon II*		
8.	Program Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan			
	1. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Golongan III Umum*	0	0	0.00
	2. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Golongan II Umum*	0	0	0.00
	3. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	46,500,000	42,000,000	100.00
	4. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	264,400,000	220,449,500	100.00
	5. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III)	657,858,500	548,078,500	100.00
	6. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)	513,945,000	477,427,200	100.00
	7. Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol. III Ex Honorar*	87,937,900	0	0.00
	8. Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol II Ex Honorar*	168,399,900	0	0.00
	9. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM III) Angkatan 2*	750,132,500	520,780,450	100.00
	10. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM IV) Angkatan 2 *	610,169,000	569,326,600	100.00
9.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Administrasi Berbasis IT			
	1. Pengelolaan data kepegawaian PNS*	250,000,000	152,902,800	70.00
	2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian*	493,242,500	476,949,800	100.00
	3. Pengembangan dan pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik (e-dokumen)*	177,772,000	148,877,500	96.00
	4. Pengelolaan administrasi kepegawaian	107,675,000	84,576,800	85.00
	5. Pengelolaan website Badan Kepegawaian Daerah*	170,031,250	131,363,400	96.00
	6. Pengelolaan DUK*	179,020,300	146,463,900	85.00
	7. Pengelolaan kartu pegawai elektronik PNS*	173,908,500	165,365,650	100.00
10.	Program Analisis Jabatan dan Promosi			
	1. Rapat-rapat Tim Baperjakat Daerah Provinsi Riau	100,000,000	91,114,500	100.00
	2. Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan struktural/fungsional di	143,798,000	118,653,300	94.00

		lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau			
		3. Pengelolaan administrasi pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah dan jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Riau	169,900,000	158,282,200	96.00
		4. Pengelolaan kenaikan pangkat PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Riau	483,978,000	446,205,600	100.00
		5. Pengelolaan penetapan angka kredit jabatan fungsional widyaiswara Provinsi Riau	118,135,000	105,069,500	100.00
11.		Program Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Aparatur			
		1. Satya Lencana Karya Satya	154,269,000	133,722,400	100.00
		2. Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	610,317,300	608,917,300	100.00
		3. Monitoring dan evaluasi Tapetarum dan Taspen PNS se-Provinsi Riau	99,528,100	96,945,600	100.00
J U M L A H			35.604.203.025	28.535.925.512	80.15

Secara umum, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2013 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini tercermin dari dapat dilaksanakan tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2009-2013 yang telah diwujudkan dalam Tahun 2011 melalui 3 Misi, 7 (tujuh) sasaran strategis, 7 (tujuh) program dan 63 (enam puluh tiga) kegiatan.

2. Target Capaian Pelaksanaan Rencana Kerja 2014

Sementara itu, evaluasi pelaksanaan rencana kerja SKPD pada tahun 2014 (N-1) mengacu pada Penetapan Kinerja pada tahun 2014 yang dihubungkan dengan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2018. Terdapat 9 program dan 130 kegiatan dengan dana sebesar Rp.58.257.358.500,- tidak

termasuk Belanja Tidak Langsung yang telah diprogramkan pada tahun 2014 dengan capaian target realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%.

Tabel. 2.3 Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET REALISASI FISIK	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
			BELANJA LANGSUNG	41.202.924.250,00		
Mewujudkan sistem manajemen pemerintahan daerah berbasis e-government	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara	100%	PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.769.457.950,00		
			Kegiatan :			
			1 Penyediaan jasa surat menyurat	43.525.000,00		
			2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	917.500.000,00		
			3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	374.579.100,00		
			4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	942.872.900,00		
			5 Penyediaan alat tulis kantor	395.682.800,00		
			6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	292.916.000,00		
			7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75.000.000,00		
			8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.615.747.000,00		
			9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	189.200.000,00		
			10 Penyediaan makanan dan minuman	191.600.000,00		
			11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	767.580.250,00		
			12 Penyediaan jasa keamanan kantor	610.286.900,00		
		13 Pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau expo)	202.968.000,00			
		14 Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau	150.000.000,00			
		100%	PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	21.102.884.400,00		
		Kegiatan :				
		1 Pembangunan gudang Arsip 2 (dua) lantai BKD Provinsi Riau	926.011.500,00			
		2 Pengadaan Mebeleur	1.550.000.000,00			
3 Pengadaan peralatan gedung kantor	1.061.284.600,00					
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.926.000,00					
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.192.676.900,00					
6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	169.111.000,00					
7 Rehabilitasi Gedung I (satu) Kantor BKD Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien	1.686.843.000,00					
8 Rehabilitasi sarana dan prasarana kantor BKD Jl. Cut Nyak Dien	1.544.648.650,00					
9 Rehabilitasi Prasarana gedung UPT. Balai Diklat Jl. Ronggowarsito	3.682.500.750,00					
10 Pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan	5.000.000.000,00					
11 Pembangunan Kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya	4.248.882.000,00					
Terwujudnya sistem manajemen aparatur sipil negara berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Menurunnya persentase Aparatur dalam proses penegakan disiplin Aparatur dan yang mendapat teguran / sanksi	100%	PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1.001.760.000,00		
			Kegiatan :			
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	114.602.500,00		
			2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	107.702.500,00		
			3 Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	64.920.000,00		
			4 Pemantauan disiplin PNS	348.840.000,00		
	5 Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010	165.695.000,00				
	6 Sosialisasi PERKALAN No. 10, 11, 12 dan 13 tahun 2013 tentang Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV pola Baru	200.000.000,00				
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara	100%	PROGRAM : FASILITASI PINDAH/ PURNA TUGAS PNS	1.056.168.275,00		
			Kegiatan :			
			1 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	89.041.700,00		
			2 Pengelolaan Pensiun PNS	153.401.175,00		
			3 Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti	707.425.300,00		
			4 Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun	106.300.100,00		
Penguatan kapasitas sumber daya aparatur			Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12 hari kerja pertahun	100%	PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.930.004.600,00
					Kegiatan :	
1 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan BinteK Pegawai BKD	392.000.000,00					
2 Pembinaan fisik dan mental aparatur	124.076.000,00					
3 Penyediaan dan Pengelolaan Atribut PNS Daerah Provinsi Riau	1.413.928.600,00					
Mewujudkan sistem manajemen pemerintahan daerah berbasis e-government	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM	764.506.525,00		
			PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
			Kegiatan :			
			1 Penyusunan laporan capaian kinerja & iktisaris realisasi kinerja SKPD	88.000.000,00		
			2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	50.000.000,00		
			3 Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran	50.000.000,00		
			4 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	50.000.000,00		
			5 Penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD	250.702.750,00		
		6 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	134.895.750,00			
		7 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	93.852.350,00			
		8 Pelaporan barang milik daerah	47.055.675,00			
		Penguatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12 hari kerja pertahun	100%	PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN	2.862.645.000,00
					Kegiatan :	
					1 Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	202.060.000,00
2 Monitoring IPDN	100.000.000,00					
3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat	75.000.000,00					
4 Monitoring dan Evaluasi pasca diklat	76.646.000,00					
5 Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara	450.000.000,00					
6 Diklat TOT Widyaiswara	238.739.000,00					
7 Diklat Substansi Bagi Widyaiswara Pola Baru (TOF)	201.667.000,00					
8 Diklat TOC Pola Baru bagi Penyelenggara Diklat Dilingkungan BKD	255.099.000,00					
9 Diklat MOT Pola Baru bagi Penyelenggara Diklat Dilingkungan BKD	255.099.000,00					
10 Diklat Substansi Materi Penguasaan Diri	201.667.000,00					
11 Diklat Substansi Materi Diagnosa Perubahan	201.667.000,00					
12 Diklat Substansi Materi Tim Efektif	201.667.000,00					
13 Diklat Substansi Materi Proyek Perubahan	201.667.000,00					
14 Diklat Substansi Materi Inovasi	201.667.000,00					
100%	PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	4.715.497.500,00				
Kegiatan :						
1 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	53.702.250,00					
2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	292.961.000,00					
3 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III)	709.437.000,00					
4 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)	590.938.000,00					
5 Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III	204.648.000,00					
6 Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II	267.980.000,00					
7 Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	202.660.000,00					
8 Assessment Center Provinsi Riau	2.063.247.950,00					
9 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	208.126.500,00					
10 Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun Kepegawaian Bagi PNS Provinsi Riau	121.796.800,00					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET REALISASI FISIK	PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			BELANJA LANGSUNG	16.582.661.575,00
			11 Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintahan Prov. Riau	301.100.350,00
			12 Bimtek peraturan perkawinan dan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga	198.445.000,00
			13 Penyebarluasan informasi pembinaan dan pengembangan aparatur melalui seleksi penerimaan CPNS melalui media online	146.000.000,00
			14 Sosialisasi dan publikasi kegiatan pembinaan dan pengembangan aparatur secara visual melalui media TV online	198.000.000,00
			15 Pemberitaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur melalui media cetak	100.000.000,00
			PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	16.110.888.900,00
			Kegiatan :	
			1 Pengelolaan data kepegawaian	165.483.800,00
			2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	252.202.750,00
			3 Pengembangan dan pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik (E-Dokumen)	107.476.850,00
			4 Pengelolaan Administrasi kepegawaian	95.524.700,00
			5 Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah	92.900.000,00
			6 Pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	102.950.100,00
			7 Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik PNS	176.222.000,00
			8 Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	157.494.250,00
			9 Seleksi Penerimaan CPNS	943.810.750,00
			10 Pelaksanaan Ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	254.760.000,00
			11 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	326.400.000,00
			12 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	489.553.600,00
			13 Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	153.184.750,00
			14 Bimtek Perka BKN No. 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tata Naskah Dinas	180.447.000,00
			15 Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau	192.178.600,00
			16 Workshop Pelaksanaan Cuti PNS se Provinsi Riau	235.653.650,00
			17 Diklat Luar Negeri (Kerjasama dengan Pemerintah Singapore) I	300.000.000,00
			18 Seleksi Penerimaan IPDN	249.817.250,00
			19 Pemberian Beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas	3.154.621.000,00
			20 Diklat analisis kebutuhan diklat	174.316.550,00
			21 Pengelolaan administrasi izin belajar dan diklat luar negeri	43.953.050,00
			22 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD	624.942.350,00
			23 Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja	192.605.000,00
			24 Pelaksanaan Grand Design SDM Aparatur	250.000.000,00
			25 Diklat Kepemimpinan Situasional	141.996.500,00
			26 Pengelolaan Pengangkatan CPNS menjadi PNS	83.700.000,00
			27 Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau	167.486.800,00
			28 Monitoring, evaluasi dan orientasi pelaksanaan administrasi pengangkatan pejabat struktural eselon II	179.938.500,00
			29 Rapat-rapat Tim Baperjakat Daerah Provinsi Riau	123.441.250,00
			30 Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural/Fungsional di lingkungan Pemda Propinsi Riau	151.425.750,00
			31 Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kab/Kota se Propinsi Riau	258.708.000,00
			32 Pengelolaan Kenaikan pangkat PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.	464.448.000,00
			33 Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau.	130.445.000,00
			34 Sosialisasi Penatausahaan Jabatan Fungsional se-Propinsi Riau	88.263.600,00
			35 Penyusunan SOP dan SPP Badan Kepegawaian dan diklat	150.000.000,00
			36 Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender	136.251.800,00
			37 Penanganan Kasus kasus kepegawaian	200.755.000,00
			38 Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau	161.098.000,00
			39 Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau	313.920.000,00
			40 Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training	177.356.900,00
			41 Satya Lencana Karya Satya	417.025.400,00
			42 Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi kerja baik	868.442.300,00
			43 Monitoring dan Evaluasi Tapetatum dan taspen PNS se Provinsi Riau	149.924.800,00
			44 Pemanfaatan penggunaan kartu ASKES bagi PNS Provinsi Riau	296.563.300,00
			45 Diklat teknis komputer	75.407.000,00
			46 Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah	61.035.000,00
			47 Diklat teknis bahasa inggris	83.410.000,00
			48 Diklat Teknis Administrasi Kearsipan	67.335.000,00
			49 Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	67.335.000,00
			50 Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian	71.535.000,00
			51 Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	52.935.000,00
			52 Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan	153.214.000,00
			53 Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	1.500.000.000,00
			54 Rakor Widya Iswara	200.994.000,00
			55 Pengelolaan Humas BKD	200.000.000,00

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau yang disingkat dengan BP2D, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian, pendidikan dan latihan aparatur sipil negara. Untuk memberikan gambaran umum Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau, berikut ini dipaparkan, struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta keadaan kepegawaian dan perlengkapan.

1. Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau, maka struktur organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau, terdiri dari 1 (satu) pejabat eselon II.a sebagai Kepala Badan, yang dibantu oleh 7 (tujuh) pejabat struktural eselon III.a dan 17 (tujuh belas) pejabat struktural eselon IV.a serta Jabatan Fungsional. Rincian dan nomenklatur organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai;

- 2) Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis.
- d. Bidang Mutasi, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Mutasi Jabatan dan Non Jabatan;
 - 2) Sub Bidang Kepangkatan Jabatan dan Non Jabatan.
 - e. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Kedudukan Hukum;
 - 2) Subbidang Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan, Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Tata Usaha Kepegawaian;
 - 2) Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
 - 3) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis;
 - 4) Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis *Assesment* dan Pembinaan Rohani Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi *Assesment* Pegawai;
 - 3) Seksi Pembinaan Rohani Pegawai;
 - 4) Jabatan Fungsional.

b. Kedudukan

Kedudukan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
- b. Mengambil keputusan;
- c. Perencanaan manajemen dan pengembangan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pengorganisasian;
- e. Pelayanan umum dan teknis manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
- f. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
- g. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
- h. Pelaksanaan rencana kerja;
- i. Pembiayaan
- j. Penelitian dan pengkajian menyangkut kebijakan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
- k. Pelaporan dan evaluasi sesuai dengan tugas pokok.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang disingkat SDM merupakan faktor sentral dan strategis dalam suatu organisasi. SDM dalam sebuah organisasi adalah penggerak organisasi tersebut. Demikian pula dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai, profesional dan handal. Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2013 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau didukung dengan 163 orang pegawai negeri sipil, dengan perincinan sebagai berikut:

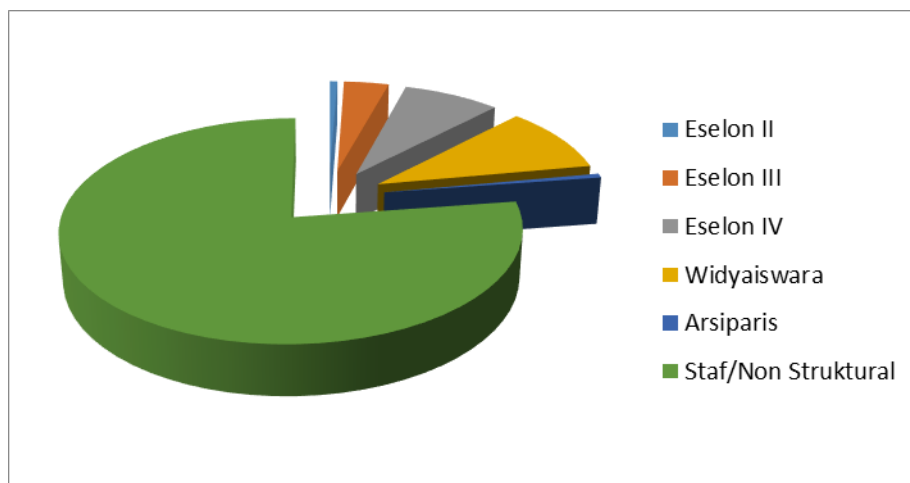
a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/Eselon

Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Menurut Jabatan Tahun 2013

NO.	JABATAN/ESELON	JUMLAH	%
1.	Eselon II	1	0,61
2.	Eselon III	6	3,68
3.	Eselon IV	13	7,98
4.	Widyaiswara	16	9,82
5.	Arsiparis	1	0,61
6.	Staf/Non Struktural	126	77,30
JUMLAH		163	100,00

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2013

Secara sederhana gambaran pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 2.1. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/Eselon Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

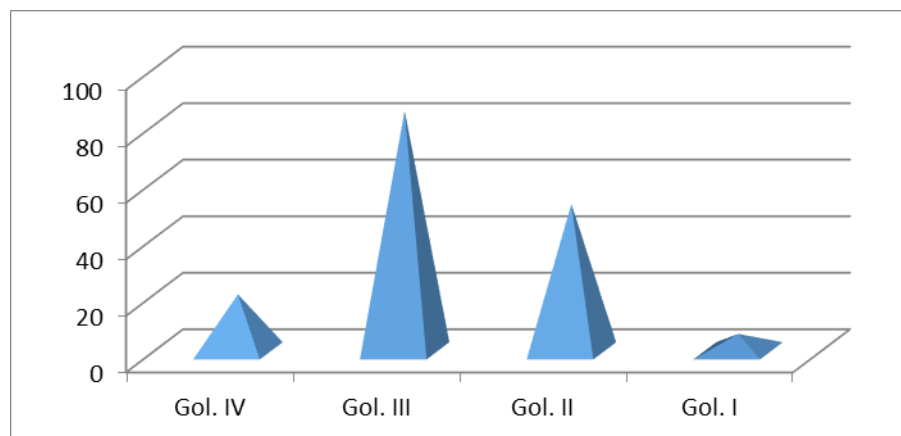
b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Gaji

Tabel 2.5. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Menurut Golongan Ruang Gaji Tahun 2013

NO.	GOLONGAN RUANG GAJI	JUMLAH	%
1.	Gol. IV	20	12,27
2.	Gol. III	85	52,12
3.	Gol. II	52	31,90
4.	Gol. I	6	3,68
JUMLAH		163	100,00

Sumber Data : Daftar Menurut Golongan Ruang Gaji Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel 2.2 diketahui bahwa Pegawai negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 75 orang atau 47,77%, sedang golongan ruang gaji terkecil adalah golongan I yang berjumlah 6 orang atau 3.82%. Secara sederhana kondisi pegawai negeri sipil menurut golongan ruang gaji dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 2.2. Keadaan Golongan Ruang Gaji Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

c. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal

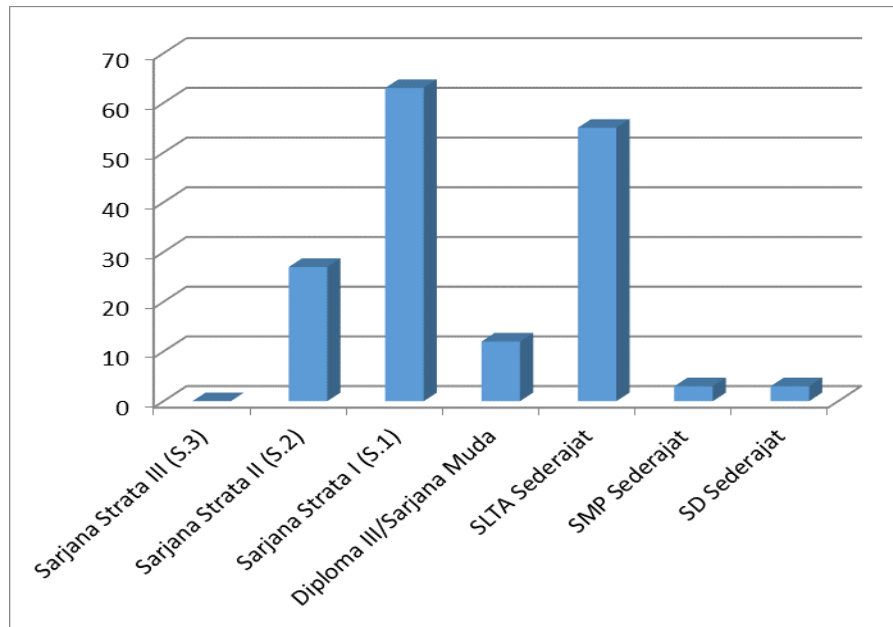
Tabel 2.6. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Menurut Pendidikan Formal Tahun 2013

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Sarjana Strata II (S.2)	27	16,56
2.	Sarjana Strata I (S.1)	63	38,65
3.	Diploma III/Sarjana Muda	12	7,36
4.	SLTA Sederajat	55	33,74
5.	SMP Sederajat	3	1,84
6.	SD Sederajat	3	1,84
JUMLAH		163	100,00

Sumber Data : Daftar Menurut Pendidikan Formal Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2013

Dari data pada tabel 2.6. diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S.1) yang berjumlah 63 orang atau 38,65%. Secara umum tingkat pendidikan pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Provinsi Riau cukup baik, dimana dari 157 orang pegawai negeri sipil terdapat 90 orang atau 55,21% yang berpendidikan Sarjana Strata I dan dan Sarjana Strata II. Secara sederhana dapat lihat gambar berikut ini.



Gambar 2.3. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

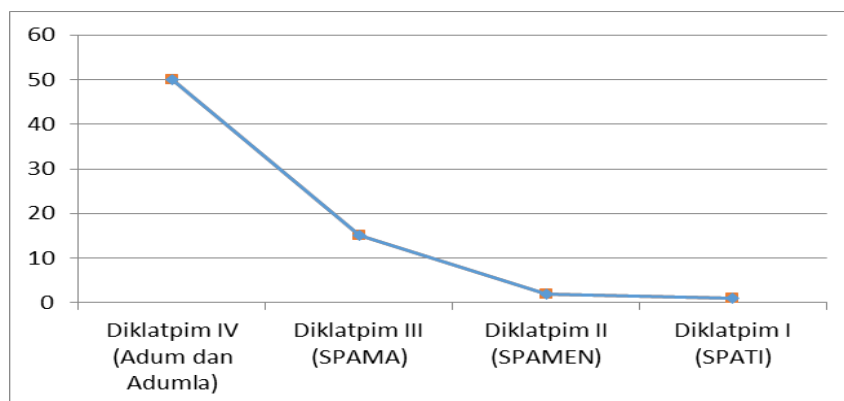
d. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan.

Tabel 2.7. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Menurut Pendidikan Penjenjangan Tahun 2013

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Diklatpim IV (Adum dan Adumla)	50	73,53
2.	Diklatpim III (SPAMA)	15	22,06
3.	Diklatpim II (SPAMEN)	2	2,94
4.	Diklatpim I (SPATI)	1	1,47
JUMLAH		68	100,00

Sumber Data : Daftar Menurut Pendidikan Penjenjangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2013

Data pada Tabel 2.7. menggambarkan bahwa pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan penjurangan berjumlah 68 orang atau 41,72% dari total pegawai negeri sipil. Secara sederhana gambaran pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau yang telah mengikuti pendidikan penjurangan dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 2.4. Tingkat Pendidikan Penjurangan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

e. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.8. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1.	Laki-Laki	107	65,64
2.	Perempuan	56	34,36
JUMLAH		163	100,00

Sumber Data : Daftar Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2013

Data pada Tabel 2.8. menggambarkan bahwa pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau didominasi jenis kelamin laki-laki yang mencapai 107 orang atau 65,64%. Secara sederhana gambaran dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 2.5. Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau.

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pergeseran tatakelola penyelenggaraan dari pemerintahan yang sentralistik ke desentralisasi memberikan dampak signifikan terhadap manajemen pengelolaan kepegawaian. Kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan besar dan luas bagi daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya yang ada termasuk dalam pengelolaan kepegawaian. Oleh karena itu tanggungjawab menciptakan birokrasi yang ideal tidak hanya bertumpu pada kebijakan Pemerintah Pusat, melainkan juga kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau, menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian, pendidikan dan latihan aparatur sipil negara. Secara spesifik peran tersebut tercermin dalam rumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam pembinaan dan manajemen kepegawaian.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau,

mengemban tugas untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pembinaan dan manajemen kepegawaian daerah. Tugas ini semakin kompleks dengan adanya arus reformasi birokrasi yang menjadi agenda nasional untuk menciptakan tatanan birokrasi yang mampu menjawab perubahan sosial yang dinamis dan kompleks.

Sehubungan dengan itu kinerja pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau dalam mengemban tugas pokok dan fungsi, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Berdasarkan analisis terhadap kondisi saat ini dan masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.9. Kekuatan dan Kelemahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> a. Eksistensi kelembagaan yang cukup kuat melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; b. Jumlah atau kuantitas sumber daya manusia pelaksana teknis sudah memadai; c. Adanya kondisi kerja yang kondusif antar pimpinan dan staf; d. Kesejahteraan pegawai yang memadai; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana Prasarana belum memadai; 2. Kualitas sumber daya manusia belum mencukupi kebutuhan; 3. Pemahaman dan implementasi tugas pokok dan fungsi pegawai yang belum sesuai; 4. Kurang sinkronisasi antara tugas pokok dan fungsi dengan anggaran; 5. Tenaga fungsional tertentu widyaiswara yang terbatas; 6. Masih rendahnya kedisiplinan pegawai; 7. Sarana dan Prasarana Kerja yang belum memadai;

2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Untuk menentukan isu-isu strategis, dipergunakan analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threats yang disingkat SOWT dan dikelompokan

menjadi 4 (empat) kelompok strategi, yaitu:

1. *Strength–Opportunities* (SO), yaitu strategi untuk memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada;
2. *Strength–Threats* (ST), yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman serta mengubahnya menjadi peluang;
3. *Weakness–Opportunity* (WO), yaitu strategi memperkecil kelemahan dengan memaksimalkan peluang yang ada;
4. *Weakness–Threats* (WT), yaitu strategi memperkecil kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;

Hasil interaksi antara Peluang, Tantangan, Kekuatan dan Kelemahan yang dimiliki Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 2.10 Analisis Isu-Isu Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

FAKTOR EKSTERNAL	<p><u>PELUANG:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi; 3. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara; 4. Kemajuan teknologi informasi atau elektronik <i>government (e.gov)</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan; 	<p><u>TANTANGAN:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance dan clean governance</i>); 2. Formasi pegawai negeri sipil yang masih sentralistik; 3. Penerapan Prinsip <i>Spoil System</i> Dalam Pembinaan Pegawai; 4. Inkonsistensi kebijakan dalam penyelenggaraan manajemen pegawai; 5. Penyelenggaraan Otonomi Daerah
FAKTOR INTERNAL		

<p><u>KEKUATAN:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi kelembagaan yang cukup kuat melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; 2. Jumlah atau kuantitas sumber daya manusia pelaksana teknis sudah memadai; 3. Adanya kondisi kerja yang kondusif antar pimpinan dan staf; 4. Kesejahteraan pegawai yang memadai; 	<p><i>ISU STRATEGIS (SO):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan eksistensi kelembagaan untuk peningkatan pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara yang objektif, transparan dan akuntable; • Mengoptimalkan kerja-sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara; • Mengoptimalkan eksistensi kelembagaan untuk peningkatan pembinaan dan manajemen aparatur sipil dengan melalui penerapan <i>e.government</i> • Mengoptimalkan kondisi kerja kondusif untuk mengoptimalkan pelayanan kepegawaian dengan penerapan <i>e.government</i>; • Mengoptimalkan tingkat kesejahteraan yang memadai untuk peningkatan pelayanan kepegawaian. 	<p><i>ISU STRATEGIS (ST):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan eksistensi kelembagaan untuk membangun pemerin-tahan yang baik dan bersih (<i>good governance dan clean governance</i>) melalui standar operasional prosedur dan pelayanan yang sertifikasi ISO 9000; • Mengeliminir penerapan prinsip spoil system melalui eksistensi kelembagaan; • Mengoptimalkan peranan sumberdaya manusia aparatur untuk penyusunan formasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah; • Meningkatkan eksisten kelembagaan untuk mengeliminir prinsip <i>spoil system</i>; • Mengoptimalkan kuantitas sumber daya manusia untuk meiliminir inkonsistensi kebijakan • Mengoptimalkan tingkat kesejahteraan dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
---	---	--

<u>KELEMAHAN:</u>	<i>ISU STRATEGIS (WO):</i>	<i>ISU STRATEGIS (WT):</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas sumber daya manusia belum mencukupi kebutuhan; 2. Pemahaman dan implementasi tugas pokok dan fungsi pegawai yang belum sesuai; 3. Kurang sinkronisasi antara tugas pokok dan fungsi dengan anggaran; 4. Tenaga fungsional tertentu widyaiswara yang terbatas; 5. Masih rendahnya kedisiplinan pegawai; 6. Sarana dan Prasarana Kerja yang belum memadai; 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; • Meningkatkan pemahaman dan implementasi tugas pokok dan fungsi pegawai melalui kerjasama dengan pihak ketiga; • Mengoptimalkan penyusunan anggaran dengan penerapan <i>e.government</i>; • Meningkatkan kapasitas tenaga fungsional widyaiswara melalui kerja sama dengan pihak ketiga; • Meningkatkan disiplin pegawai dengan penerapan <i>e.government</i>; • Meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kerja dan kemajuan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance dan clean governance</i>) • Mengoptimalkan formasi PNS untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur; • Mengembangkan sistem rekrutmen, penempatan dan pengisian jabatan yang lebih mengedepankan prinsip profesionalitas • Mengeliminasi inkonsistensi kebijakan kepegawaian dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai • Mengoptimalkan peran penyelenggaraan otonomi dalam peningkatan disiplin pegawai; • Mengoptimalkan peran penyelenggaraan otonomi dalam peningkatan kesejahteraan pegawai • Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dengan mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi daerah.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Pergub No 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015, dapat dibandingkan antara usulan awal program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dengan hasil RKPD, dimana terdapat 3 Program yang menjadi usulan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Dearah Provinsi Riau yang tidak termasuk kedalam RKPD, hal ini tergambar pada tabel berikut ini;

Tabel 2.13. Perbandingan Program Berdasarkan Usulan SKPD dengan RKPD

NO	PROGRAM	
	USULAN SKPD	RKPD
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
7	Pendidikan Kedinasan Aparatur Sipil Negara	
8	Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	
9	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	

Pada RKPD terdapat penambahan pagu dana sebesar Rp. 3.165.819.000 yang merupakan penambahan 5 kegiatan baru yang bertujuan untuk lebih mempertajam visi dan misi yang ada. Lima kegiatan baru tersebut adalah:

- a. Diklat Bahasa Inggris (Toefl);
- b. Diklat Pengembangan Potensi Akademik;
- c. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana Aparatur;
- d. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Analisis Kepegawaian;
- e. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Peneliti.

BAB III

Tujuan dan Sasaran

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau sebagai salah satu satuan kerja perangkat pemerintah daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Pusat, selaku lembaga pembina dalam penyelenggaraan/pelaksanaan pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara. Terdapat 4 (empat) kementerian/ lembaga yang memiliki keterkaitan langsung bagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB memiliki *visi* "Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani" dan *misi* "Penggerak Utama Reformasi Birokrasi". Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
- d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
- e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Penataan struktur birokrasi;
- b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
- c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri sipil secara terbuka
- d. Profesionalisasi pegawai negeri sipil;
- e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (*e-government*)
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
- h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
- i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil;

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkankan oleh BKN adalah “menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis mompetensi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, netral dan sejahtera. Visi tersebut dicapai melalui 6 (enam) misi, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia pegawai negeri sipil;
- b. Merumuskan kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan

- menyusun peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian;
- d. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian ;
- e. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan manajemen internal Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010-2014 dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui peningkatan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur;
- b. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.

Gambaran diatas memberikan arah dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis, merupakan penjabaran dan tindaklanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;

Lembaga Administrasi Negara yang disingkat LAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN

bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah “Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”. Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- c. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- d. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi; Peningkatan kapasitas organisasi LAN.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan peningkatan program pendidikan kedinasan Aparatur Sipil Negara dan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

4. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Badan Pendidikan dan Pelatihan, yang merupakan salah satu unit organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi

“Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Yang Profesional dan Berkesinambungan” yang dicapai melalui 7 (tujuh) misi yaitu:

- a. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan;
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga kediklatan;
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. Melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan;

Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 4 (empat) Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusat atau nasional yang terkait dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, melalui identifikasi kebutuhan pegawai dan penyusunan standar pelayanan;
- c. Mengembangkan sistem rekrutmen, penempatan dan pengisian jabatan yang lebih mengedepankan prinsip profesionalitas;
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepegawaian mencakup proses rekrutment (pengadaan) PNS dan

- pengembangan sumberdaya manusia aparatur pemerintah;
- e. Optimalisasi sistem kepegawaian berbasis informasi teknologi Sinkronisasi kebijakan Kepegawaian;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi di tingkat pusat dan daerah secara bertahap;
 - g. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi;
 - h. Menyusun pedoman pembinaan dan pengembangan aparatur sesuai otonomi daerah menyiapkan peraturan - peraturan maupun petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengembangan aparatur;
 - i. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, melalui identifikasi kebutuhan pegawai dan penyusunan standart pelayanan;
 - j. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

B. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH

Sebagaimana diungkapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2018 dinyatakan bahwa visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah *"Terwujudnya Pemerintah Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Yang Tinggi, Menurutnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemantapan Aparatur"* . Selanjutnya dipaparkan pula bahwa salah satu misi untuk mencapai visi, yaitu misi kelima yaitu *"Mewujudkan Pemerintah Yang Terpercaya (Handal)"*.

Kutipan diatas memberikan gambaran bahwa menempatkan peran yang cukup besar dan signifikan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau untuk melaksanakan misi

dalam pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan yang diharapkan dari misi kelima tersebut adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dengan sasaran:

1. Membaiknya kinerja pengelolaan keuangan, dengan indikator Opini Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Meningkatnya efektifitas dan integritas Pemerintah Daerah, dengan indikator indeks efektifitas pemerintahan dan indeks integritas pelayanan publik;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, dengan indikator nilai akuntabilitas;
4. Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator nilai keterbukaan informasi.

Pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana tersebut diatas dilakukan melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah terkait. Dari analisis terhadap program pencapaian sasaran dari misi kelima terdapat program yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau, yaitu:

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pendidikan Kedinasan Aparatur Sipil Negara
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
6. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
7. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

Disamping itu terdapat pula 2 (dua) program pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

C. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 2015

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau selaku institusi yang dipercaya sebagai pemegang peran sentral dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur yang profesional, untuk itu disusun Visi dan Misi BKD Propinsi Riau yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Mengingat pentingnya visi dan misi bagi suatu organisasi, dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah maka visi dan misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau pada Rencana Strategis periode 2014-2019 adalah *"Terwujudnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai Pusat pembangunan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi menuju Visi Riau 2025"*.

Makna yang terkandung dalam visi:

- a. *Pusat pembinaan aparatur*, adalah pusat pembinaan aparatur pemerintah yang mampu mengkoordinasikan, memadukan, dan menyelaraskan kegiatan pembinaan Aparatur Pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Riau;
- b. *Pusat pengembangan aparatur pemerintah*, adalah sebagai pusat pengembangan kapasitas dan kapabilitas aparatur sipil negara

Pemerintah Provinsi Riau yang mampu menyusun rencana dan program/kegiatan (*actionplann*), agenda-agenda perubahan serta melaksanakan program/kegiatan dan agenda tersebut;

- c. *Aparatur yang professional*, adalah sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memenuhi syarat-syarat kompetensi dibidang tugas dan pekerjaanya, loyal, mempunyai integritas, mampu bekerja keras, dan mempunyai motivasi;
- d. *Sejahtera*, adalah untuk menunjukkan bahwa penghasilan aparatur dapat memenuhi tingkat hidup yang layak dengan memperhitungkan antara beban kerja dan prestasi kerja yang dapat meningkatkan motivasi aparatur sipil negara.

Secara konseptual, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi akan membantu semua komponen untuk memahami substansi yang terkandung dalam visi. Dengan demikian, rumusan misi yang baik akan memberikan panduan kejelasan arah bertindak semua komponen untuk menentukan arah kebijakan, program hingga kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi organisasi.

Rumusan misi ditetapkan berdasarkan visi dengan memperhatikan lingkungan strategis baik, internal maupun eksternal. Aspek internal menyangkut kekuatan dan kelemahan. Sedangkan aspek eksternal menyangkut peluang dan ancaman. Berdasarkan rumusan visi dan telaah lingkungan strategis, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau menetapkan misi 2014-2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia aparatur sipil negara Pemerintah Daerah Provinsi Riau;
- b. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur

sipil negara yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*good government*);

- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian prima;

Makna yang terkandung dalam misi tersebut adalah:

- a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia aparatur sipil negara Pemerintah Daerah Provinsi Riau adalah menyediakan sumber daya manusia yaitu aparatur yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya dan menjamin kelancaran kebijakan pembinaan dan manajemen kepegawaian melalui pendidikan bergelar maupun non gelar;
- b. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*good government*). Misi ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan sistem rekrutmen, penempatan dan pengisian jabatan yang lebih mengedepankan prinsip objektif, profesionalitas dan akuntabel;
 - b. Meningkatkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pembinaan dan manajemen kepegawaian mencakup proses penyusunan formasi, pengadaan atau rekrutment, pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, hukuman disiplin dan pemberhentian atau pensiun aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Riau;
 - c. Optimalisasi sistem pembinaan dan manajemen kepegawaian berbasis informasi teknologi dan sinkronisasi kebijakan kepegawaian.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan pelayanan

prima melalui:

- 1) Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kerja, standar pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara serta kemajuan teknologi;
- 2) Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, dengan penerapan elektronik pemerintahan (*e-government*) yang didukung dengan data base sistem informasi manajemen aparatur sipil negara;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai dengan menyusun program pendidikan dan pelatihan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, rekrutmen tenaga pengajar/widyaiswara yang memiliki kompetensi sesuai bidang yang dibutuhkan.

Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai BKD Provinsi Riau Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

Misi 1: Meningkatkan mutu sumber daya manusia aparatur sipil negara Pemerintah Daerah Provinsi Riau			
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Memperkuat sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	1.1. Penguatan kapasitas sumber daya aparatur	1.1.1. Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12 hari kerja pertahun
			1.1.2. Aparatur Sipil Negara yang kompetensi dengan tugas pokok dan fungsi

Misi 1: Meningkatkan mutu sumber daya manusia aparatur sipil negara Pemerintah Daerah Provinsi Riau			
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			1.1.3. Aparatur Sipil Negara yang mengikuti uji kompetensi (<i>assessment</i>)
			1.1.4. Aparatur Sipil Negara yang dapat memenuhi kebutuhan dasar
Misi 2: Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) pemerintahan yang bersih (<i>good government</i>)			
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Optimalisasi Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis teknologi informasi (<i>e-government</i>)	1.1. Terwujudnya Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (<i>e-government</i>)	1.1.1. Modul dalam Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara yang diterapkan secara on-line
			1.1.2. Penyelesaian pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara
			1.1.3. Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin

BAB IV

Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Program dalam setiap SKPD dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni program rutin dan program prioritas. Program rutin meliputi program pelayanan administrasi perkantoran. Sedangkan program prioritas adalah serangkaian kebijakan yang menjadi prioritas dalam periode tertentu. Seleksi berbagai kebijakan untuk masuk dalam kategori prioritas menjadi kelaziman mengingat keterbatasan anggaran.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah pelayanan berupa urusan kepegawaian kepada aparatur pemerintah. Dalam mencapai sasaran strategis ini terdapat beberapa program yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2015 yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program Peningkatan disiplin aparatur sipil negara;
4. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
6. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Adapun Rincian Rencana kegiatan per program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**TABEL 4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PROVINSI RIAU
TAHUN 2015**

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Kegiatan	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5	BELANJA DAERAH					199.234.270.981,69			201.128.153.823,86	
5	BELANJA TIDAK LANGSUNG					24.458.276.431,69			27.561.867.983,86	
5	BELANJA PEGAWAI					24.458.276.431,69			27.561.867.983,86	
5	1	01	Gaji dan Tunjangan			11.302.998.251,69			12.433.298.076,86	
5	1	1	Gaji Pokok			8.686.374.146,45			9.555.011.561,10	
5	1	1	Tunjangan Keluarga			923.948.859,79			1.016.343.745,77	
5	1	1	Tunjangan Jabatan			286.704.000,00			315.374.400,00	
5	1	1	Tunjangan Fungsional			294.450.420,00			323.895.462,00	
5	1	1	Tunjangan Fungsional Umum			432.657.225,00			475.922.947,50	
5	1	1	Tunjangan Beras			367.577.105,28			404.334.815,81	
5	1	1	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus			207.518.655,17			228.270.520,68	
5	1	1	Pembulatan Gaji			807.840,00			888.624,00	
5	1	1	Iuran Asuransi Kesehatan			102.960.000,00			113.256.000,00	
5	1	1	Tambahan Penghasilan PNS			13.155.278.180,00			15.128.569.907,00	
5	1	1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja			13.155.278.180,00			15.128.569.907,00	
21	02		BELANJA LANGSUNG			174.775.994.550,00			173.566.285.840,00	
21	02	01	PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara		8.677.000.300,00			9.704.416.650,00	
			Kegiatan :							
21	02	01	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terciptanya kelancaran dalam proses administrasi surat menyurat untuk 12 bulan	Pekanbaru	12 bulan	47.877.500,00	12 bulan	52.665.250,00
21	02	01	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 12 bulan	Pekanbaru	12 bulan	1.009.250.000,00	12 bulan	1.110.175.000,00
21	02	01	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas dan Operasional BKP2D Provinsi Riau	Pekanbaru	12 bulan	412.037.000,00	12 bulan	453.240.700,00
21	02	01	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan Kantor BKP2D Provinsi Riau	Pekanbaru	12 bulan	1.037.160.000,00	12 bulan	1.140.876.000,00
21	02	01	5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor BKP2D Provinsi selama 12 bulan	Pekanbaru	12 bulan	474.819.300,00	12 bulan	569.783.200,00
21	02	01	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan BKP2D Provinsi Riau	Pekanbaru	12 bulan	322.207.600,00	12 bulan	354.428.300,00
21	02	01	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan di BKP2D Provinsi Riau	Pekanbaru	12 bulan	82.500.000,00	12 bulan	90.750.000,00
21	02	01	8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan perlengkapan di BKP2D Provinsi Riau	Pekanbaru	1 paket	2.877.321.700,00	1 paket	3.165.053.800,00
21	02	01	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BKP2D Provinsi Riau	Pekanbaru	12 bulan	208.120.000,00	12 bulan	228.932.000,00
21	02	01	10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu	Pekanbaru	12 bulan	210.760.000,00	12 bulan	231.836.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Kegiatan	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
			BKP2D Provinsi Riau								
21	02	01	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi BKP2D ke luar dan dalam daerah	Pekanbaru	12 bulan	844.338.200,00		12 bulan	928.772.100,00
21	02	01	12	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor BKP2D Provinsi Riau untuk 12 bulan	Pekanbaru	16 orang	732.344.200,00		20 orang	878.813.100,00
21	02	01	13	Pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau expo)	Terlaksananya penyelenggaraan Riau Expo	Pekanbaru	1 pameran	223.264.800,00		1 pameran	245.591.200,00
21	02	01	14	Rapat Koordinasi BKP2D se-Provinsi Riau	Terlaksananya Rapat Koordinasi BKP2D se-Provinsi Riau	Pekanbaru	1 dokumen	195.000.000,00		1 dokumen	253.500.000,00
21	02	02		PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar			128.832.111.700,00			123.240.150.400,00
				Kegiatan :							
21	02	02	1	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur BKP2D Provinsi Riau	Pekanbaru	1 paket	1.705.000.000,00		1 paket	1.875.500.000,00
21	02	02	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor BKP2D Provinsi Riau	Pekanbaru	1 paket	1.379.669.900,00		1 paket	1.793.570.900,00
21	02	02	3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya secara Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor BKP2D Provinsi Riau	Pekanbaru	1 paket	57.296.400,00		1 paket	80.214.900,00
21	02	02	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya secara Rutin/berkala Gedung Kantor BKP2D Provinsi Riau	Pekanbaru	1 paket	1.431.212.200,00		1 paket	1.717.454.800,00
21	02	02	5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	terpeliharanya secara Rutin/berkala perlengkapan Kantor BKP2D Provinsi Riau	Pekanbaru	1 paket	202.933.200,00		1 paket	243.519.800,00
21	02	02	6	Rehabilitasi Kantor BKP2D Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor BKP2D Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien	Pekanbaru	1 unit	1.000.000.000,00		1 unit	1.950.000.000,00
21	02	02	7	Rehabilitasi sarana dan prasarana kantor BKP2D Jl. Cut Nyak Dien	Terlaksananya Rehabilitasi sarana dan prasarana kantor BKP2D Jl. Cut Nyak Dien	Pekanbaru	1 paket	1.000.000.000,00		1 paket	1.250.000.000,00
21	02	02	8	Rehabilitasi Prasarana gedung UPT. Balai Diklat Jl. Ronggowarsito	Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana gedung UPT. Balai Diklat Jl. Ronggowarsito	Pekanbaru	1 paket	1.500.000.000,00		1 paket	1.112.000.000,00
21	02	02	9	Pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan	Terlaksananya Pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan di Pasir Putih Kabupaten Kampar	Kampar	1 paket	118.000.000.000,00		1 paket	113.217.890.000,00
21	02	02	10	Pembangunan Kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya	Terlaksananya Pembangunan Kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya	Pekanbaru	1 paket	2.556.000.000,00			-
21	02	03		PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA	Menurunnya persentase Aparatur dalam proses penegakan disiplin Aparatur dan yang mendapat teuran / sanksi			1.693.230.000,00			1.835.364.050,00
				Kegiatan :							
21	02	03	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai BKP2D Provinsi Riau Beserta Perlengkapannya	Pekanbaru	168 orang	160.443.500,00		168 orang	224.620.900,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Kegiatan	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
21	02	03	3	Pemantauan disiplin PNS	Terlaksananya pemantauan disiplin PNS di Provinsi Riau	Pekanbaru	12 bulan	418.608.000,00		12 bulan	502.329.600,00
21	02	03	4	Penanganan Kasus kasus kepegawaian	Terselesaikannya Kasus kasus kepegawaian di Provinsi Riau	Pekanbaru	7.883 orang	220.830.500,00		7.883 orang	242.913.550,00
21	02	03	5	Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau	Pekanbaru	75 orang	250.000.000,00		75 orang	275.000.000,00
21	02	03	6	Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN	Terlaksananya konseling psikologi permasalahan ASN	Pekanbaru	150 orang	375.000.000,00		100 orang	300.000.000,00
21	02	03	7	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Terlaksananya Sumpah Janji PNS di Provinsi Riau	Pekanbaru	155 orang	67.250.000,00		200 orang	78.250.000,00
21	02	03	8	Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau	Terlaksananya Pokja KPK Provinsi Riau	Pekanbaru	50 orang	161.098.000,00		50 orang	162.250.000,00
21	02	03	9	Penyediaan dan Pengelolaan Atribut PNS Daerah Provinsi Riau	Tersedianya Atribut PNS Daerah Provinsi Riau	Pekanbaru	200 orang	40.000.000,00		200 orang	50.000.000,00
21	02	06		PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan			733.719.300,00			807.091.140,00
				Kegiatan :							
21	02	06	1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pekanbaru	1 dokumen	96.800.000,00		1 dokumen	106.480.000,00
21	02	06	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran	Pekanbaru	1 dokumen	55.000.000,00		1 dokumen	60.500.000,00
21	02	06	3	Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran	Tersusunnya pelaporan Prognosis realisasi Anggaran	Pekanbaru	1 dokumen	55.000.000,00		1 dokumen	60.500.000,00
21	02	06	4	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan Akhir Tahun	Pekanbaru	1 dokumen	55.000.000,00		1 dokumen	60.500.000,00
21	02	06	5	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD	Pekanbaru	1 dokumen	148.385.300,00		1 dokumen	163.223.800,00
21	02	06	6	Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya Penja, RKT dan Lakip	Pekanbaru	3 dokumen	103.237.600,00		3 dokumen	113.561.400,00
21	02	06	7	Pelaporan barang milik daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah	Pekanbaru	1 dokumen	51.761.000,00		1 dokumen	56.937.000,00
21	02	06	8	Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan	Kabupaten/Kota	1 dokumen	168.535.400,00		1 dokumen	185.388.940,00
21	02	16		PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12 hari kerja pertahun			4.925.050.000,00			6.219.079.100,00
				Kegiatan :							
21	02	16	1	Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara	Terlaksananya Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara	Pekanbaru	30 orang	500.000.000,00		40 orang	680.000.000,00
21	02	16	2	Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Terlaksananya Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	20 orang	300.000.000,00		30 orang	360.000.000,00
21	02	16	3	Diklat TOT Widyaiswara	Terlaksananya Diklat TOT Widyaiswara	Pekanbaru	15 orang	262.612.000,00		15 orang	288.874.000,00
21	02	16	4	Diklat Training of Fasilitator (TOF)	Terlaksananya Diklat Training of Fasilitator	Pekanbaru	30 orang	201.667.000,00			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Kegiatan	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			(TOF)							
21	02	16	5	Diklat Training Officer Course (TOC)	Terlaksananya Diklat Training Officer Course (TOC)	Pekanbaru	30 orang	280.610.000,00	30 orang	308.669.000,00
21	02	16	6	Diklat Management of Training (MOT)	Terlaksananya Diklat Management of Training (MOT)	Pekanbaru	30 orang	280.610.000,00	30 orang	308.671.000,00
21	02	16	7	Diklat Luar Negeri (Kerjasama dengan Pemerintah Singapore)	Terlaksananya Diklat Luar Negeri (Kerjasama dengan Pemerintah Singapore)	Singapura	20 orang	325.000.000,00	20 orang	337.500.000,00
21	02	16	8	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Terlaksananya Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	20 orang	300.000.000,00	30 orang	510.000.000,00
21	02	16	9	Diklat analisis kebutuhan diklat	Terlaksananya Diklat analisis kebutuhan diklat	Pekanbaru	60 orang	174.316.500,00	60 orang	191.748.000,00
21	02	16	10	Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja	Terlaksananya Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja	Pekanbaru	40 orang	192.605.000,00	40 orang	192.605.000,00
21	02	16	11	Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah	Terlaksananya Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah	Pekanbaru	60 orang	150.000.000,00	60 orang	165.000.000,00
21	02	16	12	Diklat Teknis Administrasi Kearsipan	Terlaksananya Diklat Teknis Administrasi Kearsipan	Pekanbaru	60 orang	138.000.000,00	30 orang	75.000.000,00
21	02	16	13	Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	Pekanbaru	30 orang	74.068.500,00	30 orang	81.475.000,00
21	02	16	14	Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian	Pekanbaru	30 orang	78.688.500,00	30 orang	86.557.000,00
21	02	16	15	Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Pekanbaru	30 orang	58.228.500,00	30 orang	64.051.000,00
21	02	16	16	Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi	Terlaksananya Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi	Pekanbaru	30 orang	134.935.000,00	30 orang	148.428.000,00
21	02	16	17	Diklat penata usahaan keuangan daerah	Terlaksananya Diklat penata usahaan keuangan daerah	Pekanbaru	30 orang	98.500.000,00	30 orang	135.100.000,00
21	02	16	18	Diklat bendahara keuangan daerah	Terlaksananya Diklat bendahara keuangan daerah	Pekanbaru	30 orang	135.000.000,00	120 orang	240.000.000,00
21	02	16	19	Diklat pengelolaan aset daerah	Terlaksananya Diklat pengelolaan aset daerah	Pekanbaru	60 orang	174.390.000,00	90 orang	198.000.000,00
21	02	16	20	Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance	Terlaksananya Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance	Pekanbaru	60 orang	250.000.000,00	60 orang	290.000.000,00
21	02	16	21	Diklat Pengembangan e-government	Terlaksananya Diklat Pengembangan e-government	Pekanbaru	30 orang	200.000.000,00	60 orang	420.000.000,00
21	02	16	22	Diklat perencanaan tingkat dasar	Terlaksananya Diklat perencanaan tingkat dasar	Pekanbaru	30 orang	250.000.000,00	60 orang	530.000.000,00
21	02	16	23	Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Terlaksananya Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Pekanbaru	30 orang	200.000.000,00	60 orang	425.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Kegiatan	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
21	02	16	24	Diklat bahasa inggris (TOEFL)	Terlaksananya diklat bahasa inggris (TOEFL)	Pekanbaru	60 orang	91.751.000,00	60 orang	100.926.100,00
21	02	16	25	Diklat pengembangan potensi akademik	TerlaksananyaDiklat pengembangan potensi akademik	Pekanbaru	30 orang	74.068.000,00	30 orang	81.475.000,00
21	02	17		PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi dengan tugas pokok dan fungsi			29.914.883.250,00		31.760.184.500,00
21	02	17	1	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Terkelolanya dengan baik Administrasi Pindah Tugas PNS di Provinsi Riau	Pekanbaru	1.100 orang	150.000.000,00	1.200 orang	165.000.000,00
21	02	17	2	Pengelolaan Pensiun PNS	Terkelolanya administrasi Pensiun PNS di Provinsi Riau	Pekanbaru	413 orang	168.741.000,00	455 orang	185.615.000,00
21	02	17	3	Monitoring, evaluasi dan orientasi pelaksanaan administrasi pengangkatan pejabat struktural eselon II	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan orientasi pelaksanaan administrasi pengangkatan pejabat struktural eselon II kabupaten/kota se Provinsi Riau	Kabupaten/Kota se Prov. Riau	12 kab/kota	197.932.000,00	12 kab/kota	217.725.000,00
21	02	17	4	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan struktural di lingkungan Pemda Provinsi Riau	Terkelolanya Administrasi dan Penataan Jabatan struktural di lingkungan Pemda Propinsi Riau	Pekanbaru	900 orang	306.000.000,00	1000 orang	336.000.000,00
21	02	17	5	Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau	Terkelolanya Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kab/Kota se Propinsi Riau	Kabupaten/Kota se Prov. Riau	12 kab/kota	285.000.000,00	12 kab/kota	310.000.000,00
21	02	17	6	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan pangkat PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau	Pekanbaru	2.750 orang	510.892.000,00	3.025 orang	561.982.000,00
21	02	17	7	Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2D Provinsi Riau	Terlaksananya Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2D Provinsi Riau	Pekanbaru	50 orang	143.489.000,00	50 orang	157.838.000,00
21	02	17	8	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemda Provinsi Riau	Terlaksananya Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemda Provinsi Riau	Pekanbaru	2.500 orang	464.448.000,00	2.750 orang	510.892.800,00
21	02	17	9	Pengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik	terlaksananya Pengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan Standar pelayanan publik	Pekanbaru	15 sop	165.000.000,00	20 Sop	181.500.000,00
21	02	17	10	Pengelolaan administrasi izin belajar	Terselesaikannya administrasi izin belajar	Pekanbaru	1 dokumen	52.743.000,00	1 dokumen	63.292.000,00
21	02	17	11	Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Terkelolanya Administrasi kepegawaian Provinsi Riau	Pekanbaru	7.883 orang	114.629.000,00	7.883 orang	137.555.000,00
21	02	17	12	Pengelolaan Kartu Pegawai Eelektronik	Terkelolanya Kartu Pegawai Eelektronik Provinsi Riau	Pekanbaru	7.883 orang	193.844.200,00	7.883 orang	213.228.600,00
21	02	17	13	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	Tersusunnya Formasi PNS Provinsi Riau	Pekanbaru	1 dokumen	359.040.000,00	1 dokumen	394.944.000,00
21	02	17	14	Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Tertatannya Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Pekanbaru	1 dokumen	538.508.000,00	1 dokumen	592.359.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Kegiatan	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
21	02	17	15	Satya Lencana Karya Satya	Terlaksananya pemberian Satya Lencana Karya Satya bagi PNS di Provinsi Riau	Pekanbaru	330 orang	425.350.000,00	350 orang	450.250.500,00
21	02	17	16	Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti	Terlaksananya Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti	Pekanbaru	300 orang	791.350.000,00	300 orang	792.535.000,00
21	02	17	17	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun	Terlaksananya Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun	Pekanbaru	80 orang	110.250.500,00	80 orang	112.250.000,00
21	02	17	18	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi kerja baik	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi kerja baik	Pekanbaru	30 orang	870.325.000,00	30 orang	880.155.500,00
21	02	17	19	Monitoring dan Evaluasi Tapetatum dan taspen PNS se Provinsi Riau	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tapetatum dan taspen PNS se Provinsi Riau	Pekanbaru	12 kab/kota	151.250.000,00	12 kab/kota	152.755.500,00
21	02	17	20	Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Terlaksananya Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Pekanbaru	40 orang	168.503.200,00	40 orang	185.353.000,00
21	02	17	21	Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau	Pekanbaru	100 orang	274.540.900,00	100 orang	301.994.000,00
21	02	17	22	Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Terlaksananya Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	75 Orang	301.100.350,00	75 Orang	331.210.300,00
21	02	17	23	Bimbingan teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Terlaksananya Bimbingan teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	50 orang	250.000.000,00	60 orang	300.000.000,00
21	02	17	24	Bimtek Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011	Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011	Pekanbaru	200 orang	180.000.000,00		-
21	02	17	27	Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau	Terlaksananya Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau	Pekanbaru	100 orang	200.000.000,00	100 orang	225.000.000,00
21	02	17	28	Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010	Pekanbaru	70 orang	166.700.000,00	70 orang	183.370.000,00
21	02	17	30	Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara	Terlaksananya Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara	Pekanbaru	200 orang	250.000.000,00	200 orang	275.000.000,00
21	02	17	31	Workshop Kegiatan bagi PPTK	Terlaksananya Workshop Kegiatan bagi PPTK	Pekanbaru	50 orang	145.844.500,00	50 orang	160.274.500,00
21	02	17	32	Pembentukan Karakter Kepemimpinan bagi Eselon III	Terlaksananya Pembentukan Karakter Kepemimpinan bagi Eselon III	Pekanbaru	50 orang	255.782.500,00	50 orang	277.342.600,00
21	02	17	33	Pembentukan Karakter Kepemimpinan bagi Eselon IV	Terlaksananya Pembentukan Karakter Kepemimpinan bagi Eselon IV	Pekanbaru	75 orang	315.284.500,00	75 orang	333.756.500,00
21	02	17	34	Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bimtek Pegawai BKP2D	Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bimtek Pegawai BKP2D	Pekanbaru	130 orang	431.200.000,00	130 orang	474.320.000,00
21	02	17	35	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKP2D	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKP2D	Pekanbaru	140 orang	435.000.000,00	140 orang	478.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Kegiatan	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
21	02	17	36	Assessment Center Provinsi Riau	Terlaksananya Assessment Center Provinsi Riau	Pekanbaru	1,008 orang	1.756.000.000,00		1,411 orang	2.181.000.000,00
21	02	17	37	Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training	Terlaksananya Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training	Pekanbaru	100 orang	212.828.200,00		100 orang	255.393.900,00
21	02	17	38	Training Motivasi Aparatur Sipil Negara	Terlaksananya Training Motivasi Aparatur Sipil Negara	Pekanbaru	100 orang	300.000.000,00		100 orang	360.000.000,00
21	02	17	39	Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau	Terlaksananya Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	22 orang	376.704.000,00		22 orang	452.044.800,00
21	02	17	40	Pembinaan fisik dan mental aparatur	Terlaksananya Pembinaan fisik dan mental aparatur	Pekanbaru	168 orang	161.298.800,00		168 orang	209.688.400,00
21	02	17	41	Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, perencana aparatur	Terdidiknya 20 orang fungsional perencana	Pekanbaru	20 orang	1.200.000.000,00		20 orang	1.320.000.000,00
21	02	17	42	Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, analisis kepegawaian	Terdidiknya 20 orang fungsional analisis kepegawaian	Pekanbaru	20 orang	600.000.000,00		20 orang	660.000.000,00
21	02	17	43	Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti	Terdidiknya 20 orang fungsional peneliti	Pekanbaru	20 orang	1.200.000.000,00			
21	02	17	44	Monitoring IPDN	Terlaksananya Monitoring IPDN	Luar Daerah	1 dokumen	160.000.000,00		1 dokumen	176.000.000,00
21	02	17	45	Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara	Pekanbaru	1 dokumen	166.810.600,00		1 dokumen	183.491.000,00
21	02	17	46	Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II	Kabupaten/Kota	12 kab/kota	200.000.000,00		12 kab/kota	220.000.000,00
21	02	17	47	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau	Kabupaten/Kota	1 dokumen	200.000.000,00		1 dokumen	220.000.000,00
21	02	17	48	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	Kabupaten/Kota	1 dokumen	228.939.000,00		1 dokumen	251.833.000,00
21	02	17	49	Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Kabupaten/Kota	1 dokumen	173.243.600,00		1 dokumen	190.568.000,00
21	02	17	50	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS	Pekanbaru	1 paket	1.233.490.000,00		1 paket	1.434.961.000,00
21	02	17	51	Seleksi Penerimaan IPDN	Terlaksananya Seleksi Penerimaan IPDN	Pekanbaru	100 orang	324.762.000,00		100 orang	422.191.000,00
21	02	17	52	Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Terlaksananya pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Pekanbaru	280 orang	280.236.000,00		300 orang	308.259.600,00
21	02	17	53	Rakor Widya Iswara	Terlaksananya Rakor Widya Iswara	Pekanbaru	1 dokumen	221.093.400,00		1 dokumen	243.202.000,00
21	02	17	54	Orasi Ilmiah Widyaiswara	Terlaksananya Orasi Ilmiah Widyaiswara	Pekanbaru	3 orang	200.994.000,00			-
21	02	17	55	Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat	Terlaksananya penyusunan analisis Kebutuhan Diklat	Pekanbaru	1 dokumen	250.000.000,00		1 dokumen	300.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Kegiatan	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
21	02	17	56	Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Terlaksananya Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Pekanbaru	4 Aplikasi	2.154.400.000,00		2 Aplikasi	2.420.286.000,00
21	02	17	57	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	Terlaksananya Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	Pekanbaru	1 aplikasi	200.000.000,00		1 aplikasi	250.000.000,00
21	02	17	58	Pengelolaan data kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan data kepegawaian	Pekanbaru	7.883 orang	295.277.000,00		7.883 orang	324.804.000,00
21	02	17	59	Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah	Pekanbaru	12 bulan	102.190.000,00		12 bulan	112.409.000,00
21	02	17	60	Pengelolaan Humas BKD	Terlaksananya Pengelolaan Humas BKD	Pekanbaru	12 bulan	220.000.000,00		12 bulan	242.000.000,00
21	02	17	61	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Terlaksananya Pemberian Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Pekanbaru	30 orang	3.605.923.000,00		35 orang	3.972.814.000,00
21	02	17	62	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Pekanbaru	1 orang	59.072.000,00		1 orang	64.979.000,00
21	02	17	63	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Pekanbaru	15 orang	735.000.000,00		15 orang	808.500.000,00
21	02	17	64	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III)	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III)	Pekanbaru	60 orang	1.418.874.000,00		60 orang	1.560.761.000,00
21	02	17	65	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)	Pekanbaru	60 orang	1.280.000.000,00		60 orang	1.408.000.000,00
21	02	17	66	Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)	Terlaksananya seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)	Pekanbaru	100 orang	125.000.000,00		100 orang	275.000.000,00
21	02	17	67	Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III	Terlaksananya Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III	Pekanbaru	100 orang	550.000.000,00		100 orang	605.000.000,00
21	02	17	68	Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II	Terlaksananya Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II	Pekanbaru	100 orang	350.000.000,00		100 orang	385.000.000,00
J U M L A H								199.234.270.981,69			201.128.153.823,86

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.